

Manajemen Unit Produksi Menurut Persepsi Pengelola di Jurusan Bangunan SMK Negeri

Husaini Usman

Abstract: This study was an attempt to know the implementation of the production unit management at the Civil Engineering Departement of State Vocational High Schools in Daerah Istimewa Yogyakarta according to the managers, executives, and teachers. Data were collected using a closed-questionnaire, in-depth interview, and participant observation. A descriptive statistics was used to analyze data. The results indicated that the planning, executing, and controlling of production unit were good enough.

Kata kunci: manajemen unit produksi, kepala sekolah, SMK Negeri.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) ternyata belum seperti yang diharapkan. Dari 716 SMK yang ada di Indonesia ternyata masih ada 141 SMK yang belum melaksanakan PSG. Belum terlaksananya PSG karena terbatasnya daya tampung institusi pasangan. Keadaan ini semakin diperparah oleh banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat krisis moneter yang berkepanjangan.

Salah satu alternatif kebijakan yang dapat membantu terwujudnya *link and match* tersebut adalah mendirikan unit-unit produksi di setiap SMK yang dikelola secara profesional. Alternatif ini diambil karena sudah

Husaini Usman adalah dosen Jurusan Pendidikan Teknik, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dibiayai oleh Proyek DUE-Like dengan Kontrak Nomor 17/Ktr.TG/LPIU.DL/99.

ada unit-unit produksi SMK yang mutu produksi dan jasanya tidak kalah dengan dunia usaha dan industri (DUI). Contoh adalah SMK Michael di Surakarta, SMK Pertanian di Bogor, dan SMK PAL di Surabaya. Upaya pemberdayaan sekolah melalui unit produksi sekolah (UPS) ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang UP di SMK. Guna menunjang program ini, Depdikbud pada tahun ajaran 1994/1995 telah memberlakukan Kurikulum SMK Tahun 1994 dengan Ketetapan Mendikbud RI Nomor 080/U/1993 yang antara lain menyatakan bahwa SMK dapat memilih pola pendidikan kejuruan dengan menyelenggarakan UPS yang berfungsi secara profesional sebagai wahana pelatihan kejuruan, dan melaksanakan kelompok mata pelajaran kejuruan sepenuhnya di DUI.

UPS dipilih oleh SMK untuk: melatih siswa beradaptasi dengan pekerjaan yang dilakukan di DUI; melatih siswa menghasilkan barang bermutu dan bernilai ekonomis yang dibutuhkan pasar; menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dengan DUI sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di DUI; mengetahui kebutuhan DUI seperti profil tenaga kerja yang diharapkan dan mutu produk dan jasa yang diinginkan; mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di DUI; mengatasi masalah perawatan, pengembangan sumberdaya manusia (SDM), pengadaan bahan praktik serta kesejahteraan warga sekolah; menunjang biaya operasional pendidikan; mengoptimalkan pemanfaatan SDM, peralatan, dan waktu luang warga sekolah; menyediakan pekerjaan yang dapat memberikan upah kepada para siswa yang kurang mampu agar dapat mengikuti tahap-tahap pendidikan; mengetahui makna efisiensi serta persaingan yang sedang terjadi di masyarakat bisnis; mengajarkan teori kepada murid dengan pendekatan produksi yang dikontrol oleh pasar; memicu kepedulian guru terhadap peralatan dan fasilitas; dan menunjang pengembangan staf dan membantu berbagai pelatihan yang dibutuhkan (Dikmenjur, 1995).

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai tujuan di atas melalui manajemen UPS selama ini ternyata belum seperti yang diharapkan (Slamet, 1995). Banyak hambatan yang ditemui di SMK dalam mendirikan UPS. Hambatan itu antara lain berupa potensi wilayah, potensi SDM di sekolah, sumberdaya keuangan dan pemasaran, tingkatan sekolah, sistem sekolah dan lainnya. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan pelaksanaan UPS berjalan seadanya dan belum mengarah pada bentuk usaha yang sungguh-sungguh. Sejalan dengan pendapat ini, Martubi (1999) menyatakan bahwa berbagai sarana kebijakan pemerintah

tentang UPS ternyata sampai saat ini belum semuanya dapat diterapkan di lapangan seperti yang diharapkan.

Beberapa permasalahan yang ada di SMK yang terkait dengan UPS antara lain adalah manajemen UPS di SMK belum dilakukan secara profesional, adanya tantangan menghadapi era globalisasi dan industrialisasi, dan belum ada strategi-strategi tertentu untuk mengembangkan UPS ke arah profesional (Martubi, 1999). Profesional menurut Zulkabir (1990) ialah pekerjaan yang dikerjakan dengan berorientasi pasar; mampu bersaing dalam hal mutu, biaya, dan waktu; memiliki garansi pascajual; dan dikelola dengan rasa penuh tanggung jawab. Berbagai masalah manajemen UPS ini perlu dikaji secara mendalam. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan tujuan pendirian UPS akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang mengungkap lebih jauh tentang manajemen UPS di SMK.

Manajemen menurut Terry seperti yang dikutip Handoko (1998) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Terry tersebut karena fungsi-fungsi manajemen inilah yang berlaku di lingkungan Dikmenjur dalam membuat instrumen baku kinerja SMK yang di dalamnya terdapat instrumen manajemen UPS (Dikmenjur, 1999). Sementara itu, Depdikbud (1987) mendefinisikan UP sebagai satuan kegiatan yang terintegrasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan secara bertahap diarahkan untuk meningkatkan praktik industri bagi siswa SMK.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen Unit Produksi Jurusan Bangunan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penelitian ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan proses belajar mengajar yang terpadu dan bertahap yang diarahkan untuk meningkatkan praktik industri bagi siswa Jurusan Bangunan SMKN DIY.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian survai dan bertujuan mendapatkan gambaran manajemen UP Jurusan Bangunan di SMKN DIY. Berdasarkan studi pendahuluan pada Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas DIY ternyata SMKN Jurusan Bangunan yang telah melaksanakan UPS adalah SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta, SMKN 1 Seyegan, SMKN Wonosari, SMKN 2 Pengasih Kulon Progo Yogyakarta, SMKN 2 Yogyakarta, dan SMKN

3 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan mulai Januari 1999 sampai dengan 31 Maret 2000.

Populasi penelitian ini adalah UP Jurusan Bangunan SMKN DIY yang telah menyelenggarakan UPS dan juga dijadikan sampel (sampel total). Pengelola dan pelaksana UPS setiap SMKN adalah Ketua Unit Produksi 1 (satu) orang, pengurus unit produksi 5 (lima) orang, teknisi/karyawan 5 (lima) orang, dan guru-guru praktik bengkel pada Jurusan Bangunan juga 5 (lima) orang pada tahun ajaran 1999/2000. Sumber data adalah pengelola UPS di atas yaitu sejumlah 4 (empat) sekolah dikalikan 16 orang = 64 orang.

Data dikumpulkan dengan angket tertutup, wawancara mendalam, dan observasi-partisipatif. Uji reliabilitas instrumen penelitian manajemen unit produksi dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, sedangkan uji validitas instrumen menggunakan validitas muka. Teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan rumus persentase.

Berdasarkan buku Petunjuk Penilaian Monitoring dan Evaluasi (ME), Kepala Sekolah SMK, dan Reformasi, Dikmenjur 1998, rekomendasi yang diberikan kepada hasil persentase merupakan status berupa Baik (81%-100%), Cukup Baik (61%-80%), Agak Kurang Baik (41%-60%), Kurang Baik (21%-40%), dan Sangat Kurang Baik (0-20%) (Modifikasi Model Dikmenjur, 1999:3)

HASIL

Data yang diperoleh menunjukkan ranking tingkat perencanaan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY, yakni SMKN 2 Pengasih Kulon Progo adalah 72,24%, SMKN 2 Depok Sleman adalah 71,66%, SMKN 1 Seyegan Sleman adalah 66,86%, dan SMKN 2 Wonosari Gunung Kidul adalah 63,44%. Ranking tingkat pengorganisasian UP Jurusan Bangunan SMKN DIY adalah SMKN 2 Wonosari 76,57%, SMKN 2 Pengasih Kulon Progo 73,47%, SMKN 2 Depok Sleman 69,09%, dan SMKN 1 Seyegan Sleman 64%. Hasil wawancara mendalam dengan Ketua UP Jurusan Bangunan SMKN dan berdasarkan hasil observasi langsung menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian UP SMKN DIY Jurusan Bangunan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perencanaan dan struktur organisasi UPS.

Ranking tingkat pelaksanaan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY adalah SMKN 2 Wonosari Gunung Kidul 75,20%, SMKN 1 Seyegan Sleman

66,93%, SMKN 2 Depok Sleman 64%, dan SMKN 2 Pengasih Kulon Progo 62,48%. Hasil wawancara mendalam dengan Ketua UP Jurusan Bangunan SMKN DIY berdasarkan hasil observasi langsung menunjukkan bahwa pelaksanaan UPS telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan besarnya omzet UPS. Kemudian pemanfaatan hasil UPS telah dialokasikan dengan baik yaitu untuk perbaikan peralatan praktik yang telah rusak, untuk kesejahteraan karyawan, untuk modal UPS dan untuk membantu biaya pelaksanaan PSG. Selain itu, pelaksanaan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY telah melibatkan siswa khususnya siswa kelas IV, guru praktik dan teknisi. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa program UPS yang dilakukan tersebut telah mengacu kepada kurikulum yang berlaku saat ini.

Ranking tingkat pengawasan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY adalah SMKN 1 Seyegan Sleman 62,29%, SMKN 2 Pengasih Kulon Progo 62,21%, SMKN 2 Depok Sleman 60,61%, dan SMKN 2 Wonosari Gunung Kidul 55,45%. Hasil wawancara mendalam dengan Ketua UP SMK Negeri 2 Depok Sleman pada Jurusan Bangunan dan berdasar pada hasil observasi langsung menunjukkan bahwa pengawasan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya omzet UPS. Kemudian pemanfaatan hasil unit produksi telah dialokasikan dengan baik yaitu untuk perbaikan peralatan praktik yang telah rusak, untuk kesejahteraan karyawan, untuk modal unit produksi dan untuk membantu biaya pengawasan PSG. Selain itu pengawasan UP SMKN DIY telah melibatkan siswa khususnya siswa kelas IV, guru praktik dan teknisi. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa program UP yang dilakukan tersebut telah mengacu kepada kurikulum yang ada pada saat ini. Dengan demikian hasil wawancara dan observasi telah sesuai dengan jawaban angket tertutup.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai persentase perencanaan yang tinggi belum tentu menghasilkan nilai pengorganisasian yang tinggi pula. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh belum cocoknya tugas-tugas yang direncanakan dengan orang-orang yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tingkat perencanaan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY termasuk dalam kategori baik, sedangkan pengorganisasian UP Jurusan Bangunan SMKN DIY juga dalam kategori cukup baik.

Cukup baiknya perencanaan UPS disebabkan pengelola dan pelaksana UPS telah: menjalankan secara baik Pedoman Pelaksanaan UPS yang dikeluarkan oleh Dikmenjur; mengetahui dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi rambu-rambu penilaian perencanaan dan pengorganisasian UPS yang terdapat dalam instrumen penilaian Kinerja Sekolah yang dikeluarkan Dikmenjur; memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerja UPS; mempunyai kesamaan persepsi tentang tujuan pendirian UPS; memiliki perencanaan UPS yang mendukung kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; membuat rencana urutan kegiatan UPS dengan jelas; merencanakan dana UPS baik dari dalam maupun luar sekolah; memiliki rencana anggaran yang realistis; memiliki jadwal kegiatan yang baik; memiliki program jangka pendek dan panjang; dan memiliki rencana pengembangan UPS.

Alasan di atas sesuai pendapat Newman (1957) bahwa perencanaan yang sangat baik adalah perencanaan yang mengandung penentuan segala sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga sesuai pendapat Manulang (1983) dan Handoko (1997) bahwa proses perencanaan memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan kesepuluh unsur di atas. Sementara itu, sesuai dengan pendapat Pakpahan (1997), perencanaan UPS harus menitikberatkan SDM, fasilitas sekolah, dan sumber modal.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Yuwono (1998) yang menunjukkan: jenis sumberdaya yang digunakan untuk penyelenggaraan UPS adalah SDM dan fasilitas yang secara umum cukup memadai bagi penyelenggaraan UPS; proses penyelenggaraan UPS pada dasarnya sudah disiapkan melalui penerapan analisis *SWOT* untuk studi kelayakan usaha dan rencana program UPS; dari segi riset telah dilakukan riset produksi yang didasarkan atas permintaan konsumen/pelanggan, dari segi perencanaan UPS sudah menyusun rencana UPS yang memuat anggaran biaya langsung dan tak langsung. Adanya kesamaan temuan penelitian ini dengan hasil penelitian Yuwono karena baik SMKN DIY maupun SMKN 2 Probolinggo sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja UPS berdasarkan Pedoman Pelaksanaan UPS yang dikeluarkan oleh Dikmenjur.

Cukup baiknya pengorganisasian unit produksi Jurusan Bangunan SMKN DIY antara lain disebabkan oleh tersedianya struktur organisasi UPS yang sesuai dengan kebutuhan, adanya mekanisme kerja yang sesuai

kebutuhan, terpilihnya personalia yang berkualitas, adanya ketatausahaan yang tertib, adanya distribusi tugas yang jelas, adanya program kerja UPS yang jelas, dan terbentuknya badan independen (BP3) yang turut mengawasi pelaksanaan UPS.

Alasan di atas sesuai dengan pendapat Koontz (1989) dan Pakpahan (1997) yang menyatakan bahwa UP harus mempunyai beberapa faktor pendukung dalam penyusunan organisasi, antara lain tersedianya dasar hukum yang mendukung legalitas, organisasi dan manajemen independen sebagai unit usaha, tenaga kerja yang memiliki keahlian, kegiatan yang mengarah kepada mutu, dan wawasan kewirausahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Martubi (1999) yang menyatakan bahwa program-program UPS Jurusan Bangunan dan Mesin sudah terencana dengan baik, sedangkan untuk jurusan lainnya belum berjalan dengan baik. Adanya kesamaan ini disebabkan objek yang diteliti sama-sama SMKN DIY dengan rentang waktu setahun kemudian. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Subana (1999). Adanya perbedaan ini karena tempat penelitiannya berbeda yaitu di BLPT Yogyakarta, instrumen penelitiannya berbeda, dan metode serta analisis datanya berbeda. Hasil penelitian sama dengan penelitian Marjudin (2000) karena instrumen, kriteria persentase, dan sumber data yang digunakan juga sama. Hal ini disebabkan Marjudin meneliti objek yang sama dan dalam waktu yang relatif berdekatan pula.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa persentase yang tinggi dalam perencanaan dan pengorganisasian belum tentu mencerminkan persentase yang tinggi pula dalam pelaksanaan. Hal ini terjadi mungkin disebabkan adanya unsur-unsur dalam perencanaan dan pengorganisasian yang ternyata menyimpang dalam pelaksanaannya.

Tingkat pelaksanaan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY dalam kategori cukup baik. Cukup baiknya pelaksanaan antara lain disebabkan pengelola dan pelaksana UPS telah: menjalankan Pedoman Pelaksanaan UPS yang dikeluarkan oleh Dikmenjur; mengetahui dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi rambu-rambu penilaian pelaksanaan UPS yang terdapat dalam instrumen penilaian Kinerja Sekolah yang dikeluarkan Dikmenjur; memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerja UPS; melaksanakan variasi kegiatan sesuai dengan spesialisasi yang ada; mampu mengaitkan program kegiatan UPS dengan kurikulum; mampu mengaitkan program kegiatan dengan pengembangan staf; mampu membandingkan

besarnya omzet UPS dengan potensi pasar; mampu membandingkan besarnya omzet UPS dengan potensi UPS lain; mampu membandingkan besarnya omzet UPS dengan potensi injeksi modal lain jika ada; mampu memanfaatkan hasil UPS untuk pengembangan staf; mampu memanfaatkan hasil UPS untuk pengembangan sekolah; mampu memanfaatkan hasil UPS untuk pengembangan PSG; mampu memanfaatkan hasil UPS untuk kesejahteraan sekolah, mampu melibatkan badan independen (pengawas UPS) dalam pelaksanaan UPS; mampu melakukan pelaksanaan sesuai dengan rencana; mampu mencapai target; dan mampu melibatkan unsur sekolah. Alasan-alasan di atas mendukung saran Depdikbud (1993) dan Dikmenjur (1995) yang menyangkut pedoman pelaksanaan UPS.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Munadi dkk. (1994) yang menyimpulkan bahwa kegiatan unit produksi telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan UPS sudah dapat membantu mengatasi pengadaan bahan praktik meskipun jumlahnya terbatas. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Tibo (1997) yang menyimpulkan bahwa kualitas UPS siswa kelas III tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat diprediksi melalui motivasi berprestasi siswa, faktor disiplin diri, dan bimbingan guru. Tinggi rendahnya kualitas UPS dapat diprediksi dari tinggi rendahnya motivasi berprestasi dalam melaksanakan pekerjaan di UPS, tinggi rendahnya disiplin siswa dalam melaksanakan pekerjaan di UPS, dan tinggi rendahnya bimbingan guru dalam membimbing siswa yang melakukan pekerjaan di UPS.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rahmiyati (1997) yang menyimpulkan bahwa upaya memperbaiki mutu SMK adalah dengan cara melaksanakan kegiatan UPS. Kegiatan UPS merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan keterampilan baik siswa maupun guru dan dapat menambah pemasukan tambahan dana bagi sekolah. Untuk membantu meningkatkan proses belajar mengajar, kegiatan UPS memerlukan perencanaan yang matang bagi sekolah. Adanya kesamaan hasil penelitian ini disebabkan baik SMKN DIY maupun SMKN Bogor sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja UPS berdasarkan Pedoman Pelaksanaan UP yang dikeluarkan oleh Dikmenjur. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Waluyo (1998) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan UPS di Jurusan Bangunan SMKN 2 Klaten dikategorikan

efektif (71,226%). Adanya kesamaan hasil penelitian ini disebabkan baik pengelola UPS semua sekolah sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja UPS berdasarkan Pedoman Pelaksanaan UPS yang dikeluarkan oleh Dikmenjur.

Hasil penelitian ini ternyata berbeda dengan hasil penelitian Dharono dkk. (1996) yang menyimpulkan bahwa peran serta siswa dalam pelaksanaan UPS di sekolah belum optimal. Baru ada beberapa siswa di beberapa jurusan saja yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan UP. Adanya perbedaan temuan ini disebabkan perbedaan objek dan waktu penelitian. Kalau penelitian ini meneliti manajemen UP Jurusan Bangunan SMKN DIY, penelitian Dharono meneliti pelaksanaan STMN 1 Yogyakarta. Selain itu, perbedaan juga disebabkan adanya perbedaan komitmen dalam melaksanakan Pedoman Pelaksanaan UP yang dikeluarkan oleh Dikmenjur. Temuan penelitian ini ternyata tidak sesuai dengan penelitian Waluyo (1998) yang menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan pencapaian keefektifan penyelenggaraan UPS meliputi kurang aktifnya sekolah dalam menjalin hubungan dengan industri, ketidaktahuan terhadap kebutuhan industri dan arti persaingan yang ada di lingkungan industri. Adanya perbedaan temuan ini disebabkan perbedaan objek yang diteliti. Kalau penelitian ini meneliti pelaksanaan UPS Jurusan Bangunan SMKN DIY, penelitian Waluyo meneliti pelaksanaan UP Jurusan Bangunan SMKN Klaten.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa persentase yang tinggi dalam pelaksanaan belum tentu mencerminkan persentase yang tinggi pula dalam pengawasan. Hal ini terjadi mungkin disebabkan ada unsur-unsur dalam pengawasan belum berfungsi dengan baik dalam mengawasi pelaksanaan atau pengawasnya belum begitu profesional.

Tingkat pengawasan UP Jurusan Bangunan SMKN DIY dalam kategori cukup baik. Cukup baiknya pengawasan unit produksi Jurusan Bangunan SMKN DIY antara lain disebabkan pengelola dan pelaksana UP telah menjalankan dengan amat baik Pedoman Pelaksanaan UPS yang dikeluarkan oleh Dikmenjur; memenuhi rambu penilaian perencanaan dan pengorganisasian UPS yang terdapat dalam instrumen penilaian Kinerja Sekolah yang dikeluarkan Dikmenjur; memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerja UP; memiliki program pengawasan dan pengendalian (wasdal); memiliki intensitas konsistensi pelaksanaan wasdal; melaksanakan evaluasi wasdal; melaksanakan tindak lanjut hasil wasdal; memiliki

jadwal pengawasan wasdal; mengetahui pengaruh wasdal terhadap resiko yang akan terjadi; memiliki biaya wasdal yang memadai; mempunyai sistem pemantauan UPS; dan memiliki tata cara pelaporan UPS.

Alasan-alasan di atas sesuai dengan pendapat Koontz (1989), Manulang (1983) dan Handoko (1998) yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara perencanaan dengan pengawasan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Subana (1999) yang menyimpulkan: penilaian prestasi SDM yang dilakukan masih terbatas pada pengamatan terhadap tenaga kerja, kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, pengembangan SDM UPS yang kurang mendapat perhatian; dan pengawasan UPS hanya sebatas pengamatan pada waktu-waktu tertentu jika order banyak dan pekerjaan diserahkan kepada SDM yang mampu. Adanya perbedaan temuan ini disebabkan perbedaan objek yang diteliti. Kalau penelitian ini meneliti manajemen UP Jurusan Bangunan SMKN DIY, penelitian Subana meneliti pengawasan UPS di BLPT Yogyakarta. Selain itu, perbedaan juga disebabkan oleh perbedaan komitmen dalam melaksanakan Pedoman Pelaksanaan UPS yang dikeluarkan oleh Dikmenjur. Temuan penelitian ini sama hasilnya dengan temuan penelitian Hendarto (2000) karena objek, instrumen, dan waktu penelitian yang relatif sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen UPS Jurusan Bangunan SMKN DIY memiliki nilai rerata 67,70% atau dalam kategori cukup baik karena fungsi-fungsi manajemennya seperti perencanaannya telah cukup mantap, pengorganisasiannya telah cukup baik, pelaksanaannya telah cukup tepat, dan pengawasannya telah cukup ketat. Jika fungsi-fungsi manajemen ini lebih ditingkatkan lagi melalui kinerja pengelola UPS, maka kategori manajemen UPS diharapkan akan lebih meningkat lagi sehingga UPS dapat menjadi miniatur perusahaan, dan sekolah diharapkan semakin mampu membiayai sekolahnya secara mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekolahnya.

Diperlukan pembinaan yang lebih intensif terhadap UPS. Sekolah-sekolah yang belum baik manajemen UPS-nya dapat mengadakan studi banding dan meniru hal-hal yang dianggap cocok untuk diterapkan di sekolahnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud. 1987. *Manajemen Unit Produksi dan Jasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. 1993. *Kurikulum 1993 Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. 1994. *Pedoman Penyelenggaraan Unit Produksi SMK*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dharono. 1996. *Optimalisasi Pelaksanaan Unit Produksi dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar Siswa STM*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta.
- Dikmenjur. 1995. *Konsep Unit Produksi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dikmenjur. 1999. *Perangkat Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Menengah Kejuruan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Handoko, T.H. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hendarto, E.B. 2000. *Pengawasan dan Pengorganisasian Unit Produksi Jurusan Bangunan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FT-UNY.
- Koonz, H. 1989. *Management*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Manulang, M. 1983. *Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Marjudin, S. 2000. *Perencanaan dan Pengorganisasian Unit Produksi Jurusan Bangunan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FT-UNY.
- Martubi. 1999. Model-model Penyelenggaraan Unit Produksi di SMK DIY. *Jurnal Kependidikan*, Tahun XXIX (1): 21.
- Munadi, S. 1994. *Kontribusi Unit Produksi terhadap Program Pendidikan dan Pengajaran di FPTK IKIP Yogyakarta*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: FPTK IKIP.
- Newman, N.H. 1957. *Management*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Pakpahan, J. 1997. *Pengembangan Sekolah Seutuhnya*. Bandung: PPPGT.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmiyati. 1997. *Model Unit Produksi Sekolah di SMKK Negeri Bogor*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana IKIP Yogyakarta.
- Salong, S. 2000. *Pelaksanaan dan Pengorganisasian Unit Produksi Jurusan Bangunan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FT-UNY.
- Slamet, P.H. 1995. *Restrukturisasi dan Rekulturasasi Pendidikan Kejuruan*. Makalah Seminar Sehari di FPTK Yogyakarta, Agustus.
- Subana, A. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Unit Produksi di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta.

- Tibo, M. 1997. *Hubungan antara Motivasi Berprestasi, Disiplin Diri dan Bimbingan Guru dengan Kualitas Unit Produksi Siswa Kelas III Jurusan Bangunan STMN 2 Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, S. 1998. *Efektivitas Pelaksanaan Unit Produksi di Jurusan Bangunan SMKN 2 Klaten*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta.
- Yuwono, H. 1998. *Karakteristik Penyelenggaraan Unit Produksi di SMKN 2 Probolinggo Jawa Timur*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Zulkabir. 1990. Kesenjangan Okupasional: Kasus STM Jawa Barat. *Mimbar Pendidikan*, Tahun IX (4): 13.